

## **Perkuat Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Sintang dan Universitas Kapuas Teken MoU**

Dalam upaya memperluas jaringan dan memperkuat kolaborasi pengawasan partisipatif di lingkungan akademik, **Bawaslu Kabupaten Sintang** menandatangani *Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU)* dengan **Universitas Kapuas (UNKA) Sintang**, Jumat (04/06/2025). Kerja sama ini bertujuan mendorong peningkatan peran mahasiswa dan sivitas akademika dalam pengawasan partisipatif pada tahapan Pemilu dan Pilkada serentak mendatang.

Penandatanganan MoU ini dilakukan langsung oleh **Ketua Bawaslu Kabupaten Sintang, Stefanus Kardi**, bersama **Rektor Universitas Kapuas Sintang**, yang berlangsung di Ruang Rektor UNKA Sintang. Kegiatan ini disaksikan oleh jajaran dosen, mahasiswa, serta perwakilan dari Bawaslu Sintang.

Kerja sama ini adalah bentuk komitmen Bawaslu dalam memperluas pengawasan berbasis masyarakat, khususnya di lingkungan kampus. Kami percaya mahasiswa memiliki energi, pemikiran kritis, dan semangat idealisme yang kuat untuk ikut menjaga demokrasi.

### **Kolaborasi Akademik untuk Demokrasi yang Partisipatif**

Melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, Bawaslu Sintang dan Universitas Kapuas bersepakat menjalin kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pengawasan pemilu. Bentuk implementasi MoU meliputi pelaksanaan kegiatan **Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P)**, seminar, kuliah umum, hingga magang mahasiswa.

Melalui sinergi dengan kampus, kami berharap lahir generasi muda yang peduli terhadap integritas pemilu. Mahasiswa bukan hanya menjadi pemilih aktif, tapi juga pengawas partisipatif yang mampu memberikan kontribusi nyata

Selain itu, kerja sama ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk memahami lebih dalam sistem demokrasi Indonesia dan peran pengawasan dalam memastikan proses pemilu yang jujur dan adil.

### **Wujudkan Demokrasi yang Inklusif dan Transparan**

Rektor Universitas Kapuas Sintang dalam sambutannya mengapresiasi langkah Bawaslu Sintang yang terus membuka ruang kolaborasi dengan dunia pendidikan. Ia menilai MoU ini menjadi peluang berharga bagi mahasiswa untuk belajar langsung tentang proses demokrasi sekaligus berkontribusi dalam pengawasan pemilu.

Dunia akademik memiliki tanggung jawab moral untuk ikut berperan dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi. Melalui kolaborasi ini, kami berharap mahasiswa UNKA dapat menjadi pelopor pengawasan partisipatif yang cerdas dan berintegritas.

Kerja sama ini juga merupakan bagian dari program nasional *Pendidikan Pengawasan Partisipatif* yang dicanangkan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Program ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, terutama generasi muda dan komunitas akademik, dalam mengawal tahapan pemilu agar berjalan transparan dan berkeadilan.

## **Bawaslu Sintang Dorong Sinergi Lintas Sektor**

Bawaslu Sintang juga menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengawal demokrasi di daerah. Ia menuturkan bahwa kerja sama dengan perguruan tinggi merupakan bagian dari strategi *multi-stakeholder engagement* Bawaslu Sintang, yang sebelumnya juga telah menggandeng organisasi kepemudaan, ormas, dan komunitas lokal dalam pengawasan partisipatif.

Bawaslu tidak bisa bekerja sendirian. Demokrasi hanya akan kuat jika semua pihak terlibat. Melalui kerja sama seperti ini, kami ingin memastikan bahwa pengawasan partisipatif tidak berhenti di ruang formal, tapi hidup di ruang publik, terutama di kalangan generasi muda.

Lebih lanjut, Bawaslu Sintang berkomitmen untuk menindaklanjuti MoU ini dengan langkah konkret, termasuk pelaksanaan kegiatan bersama antara UNKA dan Bawaslu Sintang, baik dalam bentuk *workshop*, kelas demokrasi, maupun kegiatan magang bagi mahasiswa.

### **Arah Kolaborasi**

Penandatanganan MoU ini juga menjadi momentum penting untuk Pengawasan Partisipatif, di mana partisipasi publik dan peran pemuda akan menjadi faktor penting dalam menjaga kondusivitas serta keadilan pemilu di tingkat daerah.

Bawaslu Sintang menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi langkah strategis untuk memastikan pengawasan Pilkada 2024 berlangsung lebih terbuka, partisipatif, dan berintegritas.